

005

LAPORAN PENELITIAN

Zully Qodir

Respons Masyarakat Islam atas Perubahan : Studi atas Gerakan Pemikiran Islam Liberal di Indonesia¹

ABSTRACT

The movement of liberal Islamic thinkings in Indonesia presents between the movement of militant-perspective-Islam and the modern Islam. In this writing, it reveals that the existence of this movement is considered as jeopardising the Islamic faith. What is taken as jeopardising and perilous is on the issue of religious pluralism and interfaith dialog. However, the movement of this liberal Islamic thinkings is somewhat "prisoned" by the fact that they are mostly still centering their perspectives on Middle East's intellectuals/scholars. The agenda of the movement of this liberal Islamic thinkings has developed ever since a community study in Utan Kayu gave their serious-undivided attention towards this issue. The core of this movement is to remind its believers the most prominent issue that is the Islam being taught must be contextually, progressively, and emancipatorically made use through educational media and illumination. By doing so, this new social movement will come to the point where the emergence of the "revolution of class consciousness" takes place, instead of the static yet rigid Islamic traditional thinkings. (Keywords: movement of liberal Islamic thinkings, modern Islam, militant Islam, contextual, progressive, emancipatory, "revolution of class consciousness").

Pendahuluan

Jika kita memperhatikan pemikiran keagamaan, khususnya pemikiran Islam di negeri ini memang tidak pernah sepi, oleh karena itu selalu menarik untuk diamati, dan dikaji. Telah banyak buku dan kajian dilakukan untuk melihat perkembangan pemikiran Islam Indonesia. Namun demikian, tidak berarti bahwa kajian atas pemikiran Islam Indonesia sudah berakhir. Bahkan semakin menemukan puncaknya. Pengkajian pemikiran Islam tidak bisa dilepaskan

dari perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya, perubahan global yang turut mempengaruhi.

Kelahiran sebuah pemikiran keislaman yang mewujud dalam lahirnya organisasi organisasi keagamaan seperti SI (Sarekat Islam) oleh HOS. Cokroaminoto dan H. Agus Salim Surakarta tahun 1911 misalnya, tidak bisa lepas dari kondisi social-politik, ekonomi dan budaya ketika itu. Bahkan, kelahiran SI disinyalir

1. Tulisan ini disampaikan pada Seminar Internasional ke-4 "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Partisipasi

sebagai respons atas terjadinya dominasi perdagangan oleh etnis Cina di Solo dan Jawa Tengah, yang mendapat dukungan dari kolonial Belanda. SI lahir untuk melakukan "perlawanan" atas dominasi perdagangan yang dilakukan etnis Cina.

SI lahir mencoba memberikan jawaban pada masyarakat Islam Solo khususnya bahwa umat Islam perlu melakukan pengorganisasian diri sehingga mampu melakukan *bargaining* dengan bentuk-bentuk dominasi kapitalis dan kolonialisme. Memang SI akhirnya terpecah menjadi SI Merah di bawah pimpinan Semangun dan H. Misbach yang markas di Semarang. Sedangkan SI Putih di bawah pimpinan HOS. Cokroaminoto dan Agus Salim bermarkas di Solo. Namun, jelas bahwa SI mencoba memberikan jawab atas problem sosial ekonomi dan politik ketika itu, yang berada di bawah kontrol etnis Cina dan kolonialisme.²

Sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan, SI untuk zamannya bisa disebut sebagai organisasi keagamaan yang sangat liberal, di mana waktu itu Agus Salim, Cokroaminoto, H. Misbah dan Semangun menawarkan apa yang disebut dengan istilah "sosialisme Islam". Sosialisme Islam menjadi semacam doktrin keagamaan yang dipegangi kaum pengikut Sarekat Islam sehingga sarakat dagang muslim muncul menjadi embrio perlawanan atas kapitalisme.

Selain Sarekat Islam, organisasi sosial keagamaan yang lahir sesuai dengan zamannya adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, yang juga seorang pedagang dan pengusaha. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan menggalang kekuatan melalui kaum muslim perkotaan, yang berbasis pedagang,

pengusaha dan pegawai. Oleh sebab itu, pada masa awal-awal kelahirannya Muhammadiyah identik dengan organisasi "kaum pedagang" atau "kaum pengusaha" dan pegawai negeri. Namun belakangan ini Muhammadiyah sudah tidak bisa lagi disebut sebagai organisasi kaum pengusaha, atau kaum pedagang dan pegawai karena jamaahnya sudah sampai ke pelosok desa-desa yang petani. Kasus jamaah Muhammadiyah desa Wuluhan adalah bukti real tentang hal ini (Mulkhan, 2000).

Muhammadiyah pada awal kelahirannya menjadi organisasi yang dianggap modernis oleh para peneliti dan pengamat.³ Namun yang sebenarnya menarik dari Muhammadiyah adalah adanya sebutan *tajdid* pada organisasi ini. *Tajdid* adalah pembaharuan, sehingga secara jelas mengindikasikan adanya perubahan-perubahan yang terjadi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Perubahan radikal yang dilakukan Muhammadiyah pada masa awal-awal berdirinya adalah merubah arah kiblat shalat yang lurus kearah Barat menjadi serong kira-kira 10-20 derajat ke arah geser ke utara.

Perubahan arah kiblat ini merupakan perubahan yang sangat radikal waktu itu, sehingga menurut kisahnya KH. Ahmad Dahlan akhirnya tidak disenangi dan dibenci oleh keluarga dan orang-orang Islam sendiri. Sedangkan perubahan yang berkaitan kondisi sosial masyarakat adalah dengan mengadopsi paham-paham modern dari misionaris Kristen dalam organisasi Muhammadiyah, yaitu dengan mendirikan Rumah Sakit, Sekolah, dan Panti Asuhan (Peacock, 1986; Mulkhan, 1988).

Dengan paham modern itulah, Ahmad Dahlan kemudian mengembangkan "tafsir sosial" surat Al-Maun di kalangan orang Muhammadiyah. Di mana dimulai dengan

mengajarkan secara berulang-ulang surat Al-Maun pada santri-santrinya sehingga santrinya merasa bosan dan mempertanyakan, "Mengapa kiai selalu mengajarkan surat Al-Maun, padahal kami sudah hapal di luar kepala? Ahmad Dahlan menjawab "gugatan" santrinya dengan mengatakan apakah kalian semua sudah memahami maksud surat ini, dan bagaimana pengamalannya?

Ahmad Dahlan menafsirkan bahwa Surat Al-Maun merupakan "ayat sosial" ekonomi yang harus diterjemahkan secara nyata di lingkungan sosial masyarakat, sehingga akan berimbas pada minimalnya kaum miskin, fakir, dan lemah, karena penyantunan atas merekalah yang sebenarnya menjadi pertanda kaum beriman, kaum yang mendirikan shalat. Tafsir ini jelas tafsir yang "liberal" untuk masa itu, pada saat kebanyakan umat Islam memahami bahwa yang dinamakan ibadah adalah hanya shalat, puasa, dan haji. Ibadah adalah ibadah *mahdhah*, bukan ibadah sosial.

Ada pula yang menyatakan bahwa Muhammadiyah lahir sebagai bentuk resistensi umat Islam atas terjadinya kristenisasi misi dan *zending* di Indonesia yang berjalan gencar. Muhammadiyah prihatin atas skondisi waktu itu, di mana umat Islam banyak terpengaruh oleh ajaran-ajaran misionaris dan *zending* yang secara aktif melakukan aktivitas "dahwahnya" dengan mendompleng penjajah. Kondisi semacam ini membuat Ahmad Dahlan tidak betah dan kerasan untuk terus berpangku tangan sementara umat Islam terus-menerus digerogoti keagamaannya.

Dengan dua contoh diatas, saya hendak mengatakan bahwa kelahiran organisasi-organisasi sosial keagamaan dengan corak pemikirannya tidak bisa lepas dari kondisi sosial masyarakat yang terjadi. Tentu perubahan sosial bukan hanya karena situasi dalam negeri, tetapi

membawa gelombang "modernisasi" bahkan "sekularisasi" dalam tema demok sebagai bentuk perubahan. Kondisi itulah menurut hemat saya terus berkembang sampai sekarang, di mana Indonesia sampai mengalami krisis berkepanjangan dan henta demokratisasi hingga Soeharto jatuh 1998.

Reformasi Mulai digulirkan

Sejak reformasi digulirkan tahun 1998 mahasiswa dan masyarakat (akademik awam), telah membawa perubahan baru da kehidupan sosial kita. Termasuk da kehidupan pemikiran dan gerakan keagamaan. Tradisi kritik dan kontrol yang sebelumnya ti pernah terjadi, sejak itu menjadi bagian terpisahkan dari kehidupan sosial k. Fenomena ini tentu menggembirakan ban pihak, terutama masyarakat sipil sebagai ber keterbukaan yang telah sekian lama ditunggu datangnya. Bahkan, mungkin ti hanya kalangan masyarakat sipil, masyarakat militer maupun masyarakat politik ju menyambutnya dengan gegap gempita. Bu sambutan masyarakat politik misalnya deng berlomba-lombanya mereka mendirikan pa politik, yang hendak digunakan seba "kendaraan" meraih sukses ke tamp kekuasaan.

Sementara itu, apa yang dilakukan masyarakat sipil dengan era keterbukaan i Masyarakat sipil tampaknya banyak berinisiativ membidiknya dari sisi yang lebih akomodatif dan konsolidatif. Beberapa bentuk akomodasi masyarakat sipil misalnya dapat dilihat dengan berupaya bergandeng tangan dengan kekuatan-kekuatan pemilik modal untuk membiayai proyek demokrasi. Dalam kasus akomodasi masyarakat sipil dengan pemilik modal tampak dilakukan oleh kalangan NC dengan menggiatkan proyek-proyek

berkaitan dengan kampanye pengembangan demokrasi untuk menuju *civil society*. Kampanye ini tampaknya mendapat sambutan dari lembaga donor dengan memberikan "kucuran dana" atas pelbagai NGO dalam negeri untuk proyek demokratisasi menuju *civil society* tersebut.

Kucuran dana dari *funding agency* pada NGO-NGO tampak jelas ketika Pemilu 1999 yang lalu hendak digelar. Pendanaan tersebut terutama berkaitan dengan *civic education*, *voter education* dan *civil Islam*. Arah dari tema-tema itu adalah tumbuhnya demokrasi di Indonesia, yang ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil berada di tangan rakyat. Negara tidak berhak memaksakan kehendaknya pada rakyat untuk memilih salah satu partai politik tertentu. Bahkan rakyat dididik untuk dapat menjadi pengawas atas pelaksanaan Pemilu tersebut, rakyat diharapkan mampu memahami hak-haknya sebagai pemilih dan warga negara.

Lembaga-lembaga pengawas Pemilu dibentuk di tingkat masyarakat sampai perguruan tinggi. Di antaranya Jaringan Pengawas Pemilu Rakyat (JPPR) yang merupakan gabungan dari pelbagai lembaga-lembaga sosial keagamaan di masyarakat (baca: NU, Muhammadiyah, NA, PMII, HMI, IRM). Sedangkan di tingkat perguruan tinggi dibentuklah Forum Rektor dan UNFREL (*University Network for Free and Fair Election/ Jaringan Perguruan Tinggi Pemantau Pemilu*). Jaringan-jaringan ini bermaksud menjadi bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu pertama sejak Orde Baru tumbang, sebagai pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana Pemilu 1955 yang dinggap sebagai Pemilu paling jujur dan adil. Dan tampaknya, pelaksanaan Pemilu 1999, merupakan Pemilu yang relatif jujur dan adil ketimbang Pemilu Pemilu yang diselenggarakan

Bahkan, masyarakat sipil juga akomodatif dengan militer untuk diberi kesempatan kembali menjadi "mitra" dalam politik. Contoh tentang hal ini adalah betapa tarik ulur dilakukan oleh para politisi sipil untuk menenggang keluarnya militer dari politik. Agenda reformasi oleh kalangan mahasiswa dan cendekiawan independen, mungkin tepatnya cendekiawan organik, mengembalikan militer ke barak (*military to barracks*) ditunda sampai tahun 2004. Saat era Abdurrahman Wahid malah tahun 2009. Sementara, apresiasi masyarakat sipil atas reformasi dibuktikan dengan makin maraknya gerakan masyarakat untuk menumbuhkan demokratisasi di level *grass roots*, tingkat desa dan kaum mustad'afin. Ini yang kemudian nanti menjadi bagian dari gerakan sosial baru di Indonesia. Sedangkan konsolidasi pada tingkat masyarakat sipil dilakukan dengan cara menggalang kembali kekuatan-kekuatan sipil yang tergabung dalam pelbagai gerakan masyarakat untuk melawan kekuasaan otoriter agar tidak berkuasa kembali.

Gelombang demokratisasi benar-benar menemukan momentumnya, yakni dengan bertemunya gerakan-gerakan demokrasi transnasional seperti di Filipina, Korea, China, Brasil, dan Argentina menjadi pelajaran bersama bangsa Indonesia untuk bergerak menjadi masyarakat demokratis. Keberhasilan penggulingan Marcos oleh gerakan *people power* sehingga Qorazon Aquino menjadi presiden, telah menjadi pelajaran sangat berharga bahwa sebuah rezim otoriter dapat digulingkan dengan gerakan demokratisasi oleh rakyat. Dan itu terbukti, Soeharto tumbang oleh demonstrasi rakyat yang besar-besaran, ditambah delegitimasi kekuasaan dimata rakyat, dan tentara akibat krisis berkepanjangan.

Khusus berkaitan dengan kelompok sipil yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi, maka

kelompok yang tumbuh dari kalangan masyarakat sipil. Kelompok tersebut berkarakter dan bergerak macam-macam, namun tampaknya ingin turut serta mengawal jalannya reformasi. Berhasilkah ia? Inilah pertanyaan yang sangat sulit dijawab, sekalipun terlihat di depan mata kita. Reformasi bahkan tak jelas ujung pangkalnya, sehingga situasinya berubah kawan menjadi lawan, dan lawan menjadi kawan. Bahkan, yang paling celaka adalah semuanya seakan-akan menjadi lawan. Sekalipun memang benar dalil tidak ada kawan abadi kecuali dalam kepentingan! Inilah dalil yang barangkali paling tepat diajukan pada saat masyarakat sipil saling tarik ulur dengan kekuatan politik yang lain.

Sekarang apa kontribusi dan hikmah yang dapat diambil dari situasi seperti itu? Ternyata, dikalangan Islam muncul pelbagai gerakan keagamaan yang bila dilacak secara historis, sebenarnya telah lahir sejak sebelum reformasi digulirkan 1998. Beberapa gerakan keagamaan kontemporer muncul ke permukaan dengan membawa misi, tujuan dan model gerakannya masing-masing. Beberapa gerakan keagamaan yang muncul dan sangat keras "suaranya" misalnya, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) yang diketuai Ahmad Sumargono dengan Sekjend Adian Husaini, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dengan ketuanya Eggy Sudjana, Hizbut Tahrir, Laskar Jundullah, Forum Komunikasi *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* dengan ketua Ja'far Umar Thalib (sekarang telah dibubarkan), Forum Pembela Islam dengan ketua Habib Rizieq, Ikhwanul Muslimin, HAMMAS, dan Majelis Mujahidin Indonesia dengan ketua Abu Bakar Ba'asyir yang dikaitkan dengan Jamaah Islamiyah.

Hampir semua gerakan Islam ini bergerak

halangi, sekalipun nyawa taruhannya. Terutama yang dianggap musuh dari gerakan Islam adalah kapitalisme dan sekularisasi Barat dengan segala kaki tangannya. Barat Amerika dan mata mereka merupakan musuh utama umat Islam yang telah melancarkan perang urat saraf (*gazwulfikr*). Pilihan lawan mereka sangat jelek Amerika, hal ini karena mereka berpendirian Amerika adalah dalang kekacauan di tanah Demonstrasi mereka gelar di pelbagai tempat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, dan Semarang. Narasi paling sering di Jakarta dan Yogyakarta Barangkali, argumentasi yang dikemukakan karena Jakarta merupakan pusat kekuasaan berputarnya modal secara keseluruhan. Sedangkan Yogyakarta sebagai kota multi etnik yang banyak perguruan tinggi, sehingga suasananya sangat toleran, akademis dan berbudaya. Yogyakarta sebagai tempat persemuaian gagasan-gagasan yang bermacam-macam, dari yang paling kiri sekalipun hingga yang paling kanan dapat dilakukan (Fakih: 2002: xi).

Pada masa awal-awal reformasi digulirkan, hampir bisa dipastikan kita dapat menyaksikan pertunjukkan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Islam ini. Mereka membawa atribut seperti bendera, paku bersorban, kopian, bahkan pedang. Anak-anak mereka juga kadang-kadang dilibatkan dalam demonstrasi sekalipun harus digendong dalam suasana udara yang sangat panas karena terik matahari. Mereka tidak peduli, yang penting aspirasi umat Islam tersalurkan dan Islam tidak diinjak-injak oleh Amerika beserta anteknya. Memang tidak semua demonstrasi mendatangkan aksi kerusakan dan kerusuhan tetapi pertunjukkan kekuatan dan atribut sangat jelas memperlihatkan identitas mereka masing-masing. Bahkan, sebelum Islam radikal

ketika terjadi pemboman atas Afganistan. Negara ini dituduh oleh Amerika dan sekutunya sebagai sarang teroris hancur lebur, padahal di sana menurut aktivis gerakan Islam militan sebagai basis Islam, bahkan negara Islam. Perlakuan Amerika jelas tidak adil terhadap negara-negara muslim, karena itu harus direspons dengan segera. Apa yang dilakukan gerakan Islam ini? Beberapa bersedia mengirimkan laskarnya untuk turut berperang ke Afganistan menjadi syahid yang akan melawan kaum Barat-kafir, pimpinan Amerika. Tuduhan Amerika atas Osamah Bin Laden sebagai gembong teroris dianggap sebagai tuduhan yang ingin mendeskreditkan Islam.

Ketidakadilan pihak Barat atas Islam, terutama Islam Indonesia adalah dengan dihalang-halangnya kekuatan mereka melakukan pergerakan yang militan. Dengan bantuan militer Indonesia, gerakan militan Indonesia senantiasa ditempatkan pada posisi terpojok ketimbang diuntungkan. Dalam masalah ini menurut mereka misalnya ketika terjadi demonstrasi menertibkan tempat-tempat yang dianggap maksiat di ibu kota, merazia tempat-tempat yang diduga sebagai tempat perjudian, serta prostitusi. Gerakan Islam militan ini memang sangat tegas dalam mensikapi masalah-masalah tersebut.

Gerakan-gerakan Islam kontemporer di atas tampak sekali bahwa muara yang ingin diperjuangkan adalah soal "wajah Islam" di Indonesia. Mereka bergerak dengan mengusung tema-tema seperti pemberlakuan syariah Islam, presiden perempuan, demokrasi dan dasar negara. Perjuangan mereka memang ekstra parlementer, tetapi sebagian dari mereka didukung oleh kekuatan partai politik berasaskan Islam, seperti PPP, PBB, PK dan PKU dan Masyumi Baru. Hanya saja partai-partai Islam ini yang memiliki wakil-wakilnya di DPR/

mengenai gagasan mereka dapat dilihat pada penelitian Khamami Zada, Islam radikal (Zada: 2002:3-14).

Berkaitan dengan fenomena tersebut, dalam komunitas Islam juga muncul sebuah gerakan pemikiran yang tampaknya hendak memberi respons atas munculnya gerakan Islam yang ekstra parlementer dan bersemangat memperjuangkan Islam dalam negara (baca: negara Islam). Gerakan pemikiran pemikiran ini tampil dengan semangat pembaruan pemikiran keislaman dalam koridor liberalisme Islam. Islam oleh gerakan pemikiran ini diletakkan sebagai sebuah fakta sosial yang memiliki sejarah, sehingga kehadirannya sudah pasti memiliki konteks sosial, bukan *vacuum*. Dengan keyakinan semacam inilah, gerakan pemikiran generasi baru ini mengusung masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti demokrasi, pluralisme, kesetaraan jender, dan HAM untuk dipahami secara kontekstual, sehingga Islam tidak mandeg dan memfosil.

Liberalisme pemikiran Islam menjadi pijakan mereka. Gerakan pemikiran ini akhirnya dikenal oleh publik sebagai Islam Liberal, di mana pada satu sisi oleh kaum muda (utamanya), dan mereka yang mungkin telah jenuh dengan kemandegan pemikiran Islam di Indonesia, dianggap sebagai generasi baru pemikiran liberal Islam Indonesia, yang merupakan penerus dari gerakan pemikiran Djohan Effendy, Ahmad Wahib, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid (Barton, 1995).

Dengan demikian, munculnya gerakan pemikiran Islam liberal di Indonesia sebenarnya memiliki arkeologi (genealogi) sosiologis, bukan tiba-tiba. Arkeologi pemikiran inilah yang sebenarnya perlu dikaji lebih lanjut sehingga bisa ditemukan landasan epistemologinya, karena tidak mungkin sebuah gerakan pemikiran tanpa metodologi dan epistemologi. Dan juga

Muhammadiyah, NU, NGO, PT serta beberapa kelompok studi. Namun demikian, tulisan ini lebih memfokuskan pada gerakan pemikiran Islam Liberal di kalangan Jaringan Islam Liberal yang sejak di-*launching* tahun 2001 menjadi sangat fenomenal.

Istilah Islam Liberal

Istilah Islam Liberal sebenarnya sudah dikenalkan oleh Leonard Binder, ketika dia menulis *Islamic Liberalism*, (Binder, 1988:191) di mana di sana dikemukakan kritik para cendekiawan muslim yang juga aktivis gerakan Islam seperti Sayyid Qutb, dan Muhammad Qutb tentang pelbagai persoalan di negara-negara muslim, khususnya berkaitan dengan proses pembangunan. Selain itu, lontaran pendapat Ali Abdul Raziq seorang ilmuwan sekuler Mesir yang pendapatnya ditolak berkaitan dengan usulan perlunya "negara sekuler", karena al-Qur'an dan hadits dipahami olehnya tidak memberikan dasar-dasar yang jelas tentang bentuk negara. negara sekuler Ali Abdul Raziq dianggap oleh aktivis gerakan Islam dan mayoritas cendekiawan ketika itu ditolak dan Raziq mendapat perlakuan yang tidak mengénakkan, dia diusir dari negaranya, dan tidak boleh mengajar di Universitas Al-Azhar.

Sementara itu, Fazlur Rahman, cendekiawan muslim asal Pakistan yang di masa akhir hidupnya menjadi profesor *islamic studies* di Chicago University memberikan kerangka kategorisasi tentang gerakan pemikiran Islam menjadi: *Pertama*, gerakan Revivalis, yang lahir di awal abad 18 hingga akhir abad 19. *Kedua*, gerakan modernis yang lahir di India oleh Sayyid Akhmad Khan, di Timur Tengah oleh Jamaluddin Al-Afghani, di Mesir oleh Muhammad Abduh. *Ketiga*, gerakan neo-revivalis, gerakan yang agak modern, namun

kelompok Jamiat Alislamiyati-nya. *Keempat*, neo-Modernisme, dimana tokoh adalah Fazlur Rahman sendiri. Gerakan mempunyai sintesis progresif anti-rasionalistas modern dengan *ijtihad* dan tradisi klasik. Gerakan Neo-Modernisme inilah yang oleh Rahman dianggap sebagai syarat mutlak munculnya *renaissance Islam* (Barton, 1995: 10).

Berkaitan dengan sejarah perdebatan intelektual muslim, Charles Kurzman, (*Liberal Islam: A Sourcebook*, 1998: xv) sebenarnya terdapat apa yang dinamakan sebagai "Islam Adat" (*customary Islam*), yang ditandai dengan kombinasi kebiasaan-kebiasaan kedaerahan dan kebiasaan-kebiasaan yang juga dilakukan di seluruh dunia Islam. Kedua, "Islam Revivalist" (*revivalist Islam*), sering pula dikenal dengan sebutan Islamisme atau Wahabisme atau Fundamentalisme. Tradisi *revivalist* berkhas menyerang interpretasi tradisi "Islam Adat", yang dikatakan kurang memperhatikan terhadap inti doktrin Islam. Untuk itulah, revivalist Islam menekankan perlunya gerakan "kembali ke al-quran dan hadits" atau dengan istilah mereka "kembali ke bahasa wahyu", yaitu bahasa Arab, bukan bahasa-bahasa lokal. Gerakan pemurnian Islam yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab merupakan bentuk paling nyata dari revivalist Islam. Dengan tradisi ketiga, "Islam liberal" (*Liberal Islam*) Islam Liberal mengidentifikasi dirinya secara kontras dengan tradisi "Islam adat" dan "Islam revivalist". Islam Liberal berusaha menghadirkan kembali Islam di masa lalu sesuai dengan kepentingan modernitas. Kritik Islam Liberal atas tradisi "Islam Adat" maupun *revivalist* Islam adalah bahwa pandangan kaum Islam Adat dan revivalis yang melihat Islam masa lalu sebagai keterbelakangan, sedangkan Islam Liberal melihat Islam masa lalu jika dipahami sebagai

kata, Islam Liberal merupakan pendukung modernitas, yakni dengan memberikan penghargaan atas gerakan modernisasi, sehingga kadang Islam Liberal disebut *Islamic modernism*.

Untuk jelasnya pembahasan tentang soal Islam Liberal, akan dikemukakan tiga kategori sebagai model Islam Liberal yakni berkaitan dengan liberalisme atas sumber-sumber Islam (al-Qur'an dan tinggalan Rasulullah/hadits/sunnah), yang secara bersamaan menetapkan hukum Islam. Model pertama, menggunakan sikap atau posisi liberal didukung secara eksplisit oleh syariah; model kedua menyatakan bahwa kaum muslim bebas mengadopsi sikap liberal dalam hal yang oleh syariah dibiarkan terbuka untuk dipahami oleh akal budi dan kecerdasan manusia; dan ketiga model yang memberikan kesan bahwa syariah, yang bersifat ilahiah; ditujukan bagi pelbagai penafsiran manusia beragam. Dengan singkat Kurzman menyebut ketiga tradisi ini dengan Liberal Syariah, *Silent Syariah* dan *interpreted syariah*.⁴

Model pertama (*Liberal Syariah*) menyatakan bahwa syariah itu liberal pada dirinya sendiri jika dipahami secara tepat. Dalam hal ini, Liberal syariah menghindari adanya tuduhan bahwa terjadi ketidakotentisitasan pada sumber-sumber ortodoks atau klasik. Kedua, bahwa sikap liberal bukan saja sifat pilihan-pilihan manusia, tetapi merupakan perintah Tuhan, dan ketiga, Islam Liberal sebenarnya lebih tua daripada liberalisme Barat. Model kedua, *silent syariah*, model ini berpendapat bahwa syariah tidak memberikan jawaban-jawaban pasti tentang topik-topik tertentu. *Silent syariah* dalam berargumen menggunakan interpretasi (tafsir) syariah. Dalam model ini, sikap liberal hanya perlu ditunjukkan

dengan merujuk pada perintah-perintah yang positif bagi kemampuan pembentukan keputusan manusia secara abstrak, ketimbang praktik-praktik secara khusus. Model kedua ini juga muncul untuk menjamin adanya tuduhan atas musuh-musuh Islam terhadap wahyu Islam tentang pelaksanaan hukum Islam, di mana oleh musuh-musuh Islam dikatakan Islam tidak menawarkan sesuatu yang pasti bagi masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, biaya hidup yang tinggi, kebodohan, dan sebagainya.

Posisi model *silent syariah* adalah bahwa syariah itu pada kasus-kasus tertentu "diam", sehingga dapat dibicarakan dengan sekejelas-jelasnya (ditafsir dan ditakwil) menurut akal dan kecerdasan manusia. Kedua, melakukan analisis atas sumber-sumber tekstual klasik atas ortodoksi keilmuan, dan membatasi pembahasan pada bagian-bagian syariah yang dianggap bidah.

Model ketiga, *interpreted syariah*. Dalam pandangan ini, pertama, syariah itu berasal dari ilahi atau bersifat ilahiah, namun manusia dengan kemampuan akal dan kecerdasannya dapat melakukan tafsir. Dan tafsir inilah yang sangat memungkinkan terjadinya kekeliruan, perbedaan dan perdebatan, bahkan bisa menimbulkan konflik. Penafsiran manusia atas syariah adalah relatif. Tafsir oleh kaum liberal merupakan model terbaik, oleh karena itu tidak mungkin bisa diabaikan. Kedua, keragaman merupakan kenyataan empiris yang tidak bisa ditolak, dan merupakan tradisi Islam. Demikian juga dalam hal tafsir atas syariah. Dan ketiga, bahwa ketidaksepahaman atau adanya perbedaan dalam penafsiran adalah rahmat dan berguna bagi kaum muslim. Pluralisme merupakan sebuah jamanian kekayaan multikultural, dan keanekaragaman diperlukan

untuk pembangunan. Kita tidak bisa memnonopoli agama. Demokrasi yang kita pahami berarti pluralisme, pilihan dan kebebasan.⁵

Gerakan Islam Radikal

Mengapa mereka muncul dan amat lantang suaranya? Hal ini dapat kita pahami bahwa selama ini mereka merasa umat Islam senantiasa dipinggirkan dalam percampuran politik di Indonesia, padahal umat Islam di Indonesia sebagai umat mayoritas. Kurang terlibatnya Islam dalam percaturan politik Indonesia, oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil, dan harus dirubah. Umat Islam harus maju dan tampil ke depan untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari politik. Hanya dengan inilah, umat Islam akan dapat duduk bersanding dengan umat lain. Inilah kira-kira argumentasi mengapa umat Islam Radikal bersemangat untuk memperjuangkan aspirasi politiknya secara terang-terangan di Indonesia.

Proses peminggiran politik oleh kekuasaan terhadap umat Islam, sebenarnya bukan saja terjadi sejak zaman Soeharto berkuasa, tetapi sejak zaman Soekarno. Di mana pada masa itu politisi-politisi muslim dan partai Islam terbesar Masyumi dibekukan oleh Soekarno dan seterusnya oleh Soeharto umat Islam hanya dibolehkan bergabung dalam partai pemerintah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), selain masuk Golkar dan PDI. Tetapi tampaknya, umat Islam tidak puas dengan keputusan rezim Soeharto yang menjadikan PPP sebagai satu-satunya partai politik berafiliasi Islam. Bahkan partai politik harus berasas Pancasila, dianggap oleh gerakan Islam radikal atau militan sebagai proses peminggiran Islam itu sendiri.

Dalam ketidakpuasan tersebut, ternyata

pada akhir-akhir rezim Soeharto tumbang sed berubah, kira-kira sejak akhir tahun 19 Soeharto mulai "melirik Islam sebagai ter baiknya". Perilaku politik Soeharto tam akomodatif terhadap umat Islam, terutama ke Pemilu 1992 hampir dilangsungkan. Beber indikasi sikap akomodatif Soeharto dengan u Islam adalah disahkannya UUPA tahun 19 kebebasan berjilbab bagi anak-anak sekolah sekolah umum tahun 1991, dibentuknya IC tahun 1990, dan berdirinya Bank Syariah/B Muamalat 1991, serta dihapuskannya und Porkas/SDSB tahun 1991.

Akibat perlakuan-perlakuan rez kekuasaan yang dianggap diskriminatif, tidak adil pada umat Islam, maka umat Isl berupaya memendam dan melakuk konsolidasi, sehingga pada suatu saat na tampil dan menjadi bagian tak terpisahkan c wacana politik kekuasaan di Indonesia. Te pada saat reformasi digulirkan tahun 19 kelompok Islam Radikal inilah yang se langsung turut pula mengambil hikmahn. Betapa mereka secara leluasa bisa berkampar menyuarakan keinginannya untuk menegakl syariat Islam, membentuk negara Isla menentang perempuan sebagai preside menolak dalil demokrasi tanpa ada rasa tal sekalipun akan dituduh subversif dan dipenja

Di tengah hiruk-pikuknya gerakan Isl Radikal di atas, krisis multi dimensional ya melanda bangsa ini tidak pula berakhir. Bahk tampaknya terus berlanjut mendekati titik nac Harapan-harapan dan optimisme dari ka positivistik, dan idealis tampaknya yang tet memberikan kekuatan pada kita untuk ter bertahan dalam bentuk negara kesatu Sekalipun belakangan negara kesatu dipertanyakan kembali, untuk dicarik alternatif lainnya. Diskusi ini tidak pula tunt

bahkan sekarang mengarah pada diskusi yang tidak produktif. Di mana satu pihak mempertahankan secara mati-matian tentang bentuk negara kesatuan. Sementara di pihak lain juga mengajukan alternatif negara lain, yakni negara Islam juga dengan mati-matian. Keduanya berhenti pada klaim betapa pilihannya yang paling sempurna.

Barangakali akan lebih bermanfaat jika diskusi tentang negara dilakukan secara terbuka, lapang hati dan berwawasan kedepan. Dari sana nantinya kita berharap akan muncul alternatif terbaik tentang bentuk negara, yang mungkin disepakati oleh sebagian besar warga negara Indonesia, bukan berdasarkan pemaksaan-pemaksaan. Atau mengikuti pendapat karena rasa takut akan diteror, dihina, bahkan diancam akan dibunuh. Ini jelas tidak positif bagi sebuah perkembangan *civil society*, karena itu harus dihentikan, tidak boleh berlangsung terus-menerus. Jika tarik menarik dua kelompok yang sama-sama kuat terus berlangsung, saya kira yang akan terjadi adalah "banjir darah" anak negeri yang sama-sama tidak tahu apa latar masalahnya, dan akan kemana sebetulnya selanjutnya.

Seperti telah saya singgung, bahwa munculnya gerakan Islam Radikal sebagai bentuk dari gerakan Islam kontemporer di Indonesia, karena mereka merasa sebelumnya tidak pernah diberi ruang, kesempatan dan perlakuan adil oleh kekuasaan. Dari sini mereka kemudian membalas perlakuan tersebut, sayangnya dengan cara-cara kekerasan, dan pemaksaan-pemaksaan. Ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kita boleh berbeda pendapat tentang bentuk negara, tentang sikap terhadap pemimpin bangsa, terhadap dasar negara, tetapi tetap dalam kerangka manusia Indonesia yang mestinya cinta damai, suka bermusyawarah dan berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan

menjadi rahmat bagi semua umat.

Selain dari perasaan ketidakadilan yang diderita umat Islam sepanjang era Soekarno dan Soeharto, tampaknya munculnya gerakan Islam Radikal sebagai gerakan Islam kontemporer disebabkan karena pelbagai peristiwa di tanah air yang tidak segera terselesaikan. Negara dalam hal ini tidak mampu memberikan rasa aman kepada warganya, bahkan negara terkesan lambat dan masa bodoh dengan pelbagai konflik kekerasan yang bersifat horisontal seperti di Ambon, Poso, Sambas, Sampit dan sebagainya. Dari sana, warga negara akhirnya tidak percaya lagi pada negara, dan mereka mengambil inisiatif sendiri untuk menyelesaikan. Hanya sayang, lagi-lagi pilihan penyelesaiannya juga bersifat destruktif, tidak bersifat konstruktif. Bahkan, mungkin proses penyelesaiannya bersifat diskriminatif, seperti kebiasaan negara melakukannya. Inilah yang sebenarnya membuat gerakan demokratisasi sipil mengalami problem serius, karena anarkhisme seakan-akan tidak bisa lepas dari gerakan demokratisasi. Bahkan, seakan-akan menjadi dalil bahwa sebuah negara yang hendak menuju demokratis harus berdarah-darah. Banyak nyawa yang harus dikorbankan sebagai martir.

Kegagalan negara mengelola sumber daya manusia yang plural itulah sebenarnya yang merupakan pangkal dari kekisruhan sosial di Indonesia. Negara tidak kuasa menjadi jaring pengaman atas gejolak sosial yang sudah membara belasan tahun lamanya, sehingga begitu ada sulutan bahan bakar dengan sekecap terbakarlah ia. Negara gagal menjadi pereka sosial kemasyarakatan, karena negara tidak memperhatikan dinamika sosial yang terus berkembang. Negara dalam hal ini hanya menjadi "mata-mata", bagaimana warga negara yang bergejolak nanti akan ditindak, ditangap dan dididili oleh negara dengan caranya sendiri.

warga negara terus bergejolak, memberontak dan beberapa ingin merdeka, seperti Papua, Riau, Makasar dan Banten.

Dengan gambaran seperti itu, sebenarnya munculnya gerakan-gerakan Islam militan atau Islam Radikal di Indonesia, disebabkan karena dua penyebab utama. *Pertama*, faktor internal umat Islam sendiri. Dalam diri umat Islam sendiri dilihat telah terjadi penyimpangan-penyimpangan norma-norma agama. Kehidupan umat Islam telah terasuki cara-cara hidup sekuler yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itulah, mereka merasa berkewajiban untuk mengembalikan umat Islam ke jalan yang lurus, sesuai dengan ajaran otentik al-Qur'an. Mereka menafsirkan ajaran-ajaran atau teks agama secara literal, formalistik, sehingga merasa harus merujuk pada perilaku Nabi di Makah dan Madinah. Akibat dari pemahaman teks agama seperti ini, hasilnya mereka berusaha menolak secara radikal konsep-konsep modern seperti demokrasi, sekularisasi, HAM dan toleransi sebagai produk Barat.

Kedua, berkaitan dengan faktor eksternal umat Islam, baik datang dari perlakuan rezim Orde Baru atas umat Islam atau eksploitasi Barat atas umat Islam. Berkaitan dengan hal ini, gerakan Islam Radikal atau militan menyatakan ada dua hal penting. *Pertama*, sikap represif rezim kekuasaan atas umat Islam, seperti pada kasus Warsidi, Salman Hafidz, Imron, dengan tuduhan KomJi (Komando Jihad), ekstrem kanan dan sebagainya. *Kedua*, lemahnya negara dalam penegakkan hukum, seperti kasus-kasus kerusuhan di Ambon, Poso, Sampit, dan Sambas. Bahkan, dalam beberapa kasus seperti telah saya kemukakan, pemerintah terkesan lambat dan tidak adil.⁶

Sementara faktor eskternal, dunia internasional yang dikomandoi Amerika sebagai

negara sekuler, dianggap telah banyak tu campur dalam masalah-masalah negara-negara muslim, seperti: Bosnia, Irak, Afgansitan, Libia dan Palestina. Bagaimana sikap Amerika yang bermuka dua dalam melihat persoalan konflik negeri-negeri yang melibatkan umat Islam mayoritas di sana. Kasus Bosnia, misalnya dianggap telah terjadi *genocida* atas umat Islam dan pembunuhan besar-besaran tetapi Amerika membiarkan dan tidak mengadili pelaku-pelakunya secara hukum internasional sementara ketika Sarajevo dan Serbia konflik Amerika dengan segera turun tangan untuk menyelesaikannya. Apalagi kasus Irak, Palestina dan Libya, bagaimana Amerika demikian angkuh mengobrak-abrik kedaulatan mereka sebagai warga negara yang sah. Amerika terturut campur dalam negeri-negeri muslim, bukan mencari jalan keluarnya berbeda dengan kasus yang terjadi negara-negara muslim versus non muslim, Amerika segera turun tangan.

Barangkali memang sudah menjadi *trademark* sebuah kekuasaan yang dzalim, ketika berkuasa senantiasa ingin melakukan pengontrolan secara ketat bahkan ingin melenyapkan pusat-pusat "kekuasaan keagamaan" yang dianggap sebab basis perlawanan. Hal seperti ini terjadi ketika zaman kolonial Belanda dulu. Tetapi, dengan perlakuan kasar seperti itu, Islam akhirnya tampil sebagai kekuatan ideologis, yang oleh George M. Kahin disebut sebagai "*ideological weapon*". Gerakan perlawanan atas resistensi yang dilakukan negara, gerakan keagamaan menjalar militan melawan apa yang dipandang despot atas umat Islam.

Dari sanalah, gerakan Islam Radikal muncul untuk memberikan alternatif penyelesaian, juga dengan cara mereka. Konflik Ambon misalnya, direspons oleh mereka sebagai

konflik antar Islam dengan Kristen, sehingga umat Islam di sana bersama dengan laskar-laskar yang datang dari Jawa terus-menerus berperang dengan orang Kristen. Hal yang sama terjadi di Poso. Umat Islam merasa wajib melawan orang-orang Kristen Poso, karena dianggap telah banyak membunuh orang Islam. Korban akhirnya berjatuhan di antara dua belah pihak, dan konflik ternyata sampai sekarang belum juga berakhir. Di pihak lain, Orang-orang Kristen Ambon maupun Poso juga merasa wajib membela jamaahnya dengan berperang membunuh orang Islam. Laskar-laskar Kristus dibentuk di mana-mana dengan kekuatan pasukan tempur yang juga memadai. Pilihan-pilihan mereka atas dasar kesepakatan gerakan yang mereka bentuk, bukan atas dasar kesepakatan bersama dengan pihak masyarakat apalagi negara.

Gerakan Sosial Baru

Penjelajahan teoritik tentang gerakan sosial baru sebenarnya sudah dimulai era 1960-an dan 1970-an, namun era 1990-an menjadi era yang paling dominan dengan corak ragam yang berbeda-beda. Kajian teoritik gerakan sosial baru bisa didapat pada Rajendra Singh. (Singh: 2001) Dalam tulisan ini saya hendak meletakkan gerakan sosial baru di Indonesia era 1990-an, yang direpresentasikan oleh gerakan-gerakan *interfaith* dalam NGO.

Sejak tahun 1990-an, gerakan antaragama di negeri ini tumbuh bak jamur di musim penghujan. Ini dapat menjadi pertanda munculnya embrio gerakan *civil society*, yang nanti diharapkan akan menjadi embrio dari gerakan sosial baru. Jika tahun-tahun sebelumnya gerakan *civil society* direpresentasikan oleh tumbuh dan berkembangnya NGO-NGO yang bersifat keritatif, advokatif dan transformatif. Gerakan

berbasis pemberdayaan advokasi, transformasi dan sebagainya. Pendek kata, gerakan NGO berdasarkan fokus aktivitasnya, bukan berdasarkan kelompok yang dibangun.

Hanya saja, munculnya gerakan antaragama ini juga menjadi pertanda betapa negara ini telah mengalami delegitimisasi, negara menjadi *stateles* di mata warganya. Negara menjadi *stateles* dan tidak dipercaya lagi karena lemahnya dan lambatnya mengatasi pelbagai persoalan sosial yang terus berkembang, dan mencapai puncaknya tahun 1996, di mana kerusuhan sosial terjadi di mana-mana, sehingga krisis multidimensi menjadi bagian hidup bangsa ini.

Hikmah dari krisis multidimensi ini memang menjadikan kekuatan-kekuatan sipil seperti telah saya sebutkan, masyarakat sipil melakukan konsolidasi kekuatan untuk tampil mengambil alih peran negara yang tidak lagi bisa diharapkan. Gerakan *civil society* seakan-akan melakukan *take over* karena memang negara benar-benar tidak bisa lagi menjadi *public service*. Apalagi dalam era keterbukaan pasca reformasi, atau tepatnya pasca jatuhnya Soeharto, maka gerakan *civil society* saya duga akan terus mengalami perkembangan positif, dan saling mengisi antara satu sama lain.

Salah satu gerakan *civil society* adalah munculnya gerakan-gerakan keagamaan, yang menandai adanya kesadaran baru dari orang-orang beragama untuk ambil peran dalam membantu mencari alternatif penyelesaian krisis di negeri ini. Gerakan keagamaan inilah yang belakangan mengerucut menjadi gerakan antaragama, dan tumbuh hampir di seluruh pelosok negeri. Mereka tidak lagi berpikiran sektarian, parokhial dalam beragama, tetapi berpikir lebih humanistik, dan berpijak pada kegiatan-kegiatan sosial yang hendak dikeriakan. Memang mereka ini juga tidak

mendiskusikan wacana-wacana kontemporer perkembangan sosoal, politik, ekonomi dan budaya, sebagai bagian proses pendidikan politik bangsa. Gerakan semacam ini saya anggap sebagai bukti kepedulian sosial mereka.

Beberapa faktor penyebab munculnya gerakan agama di Indonesia, paling tidak dapat diidentifikasi menjadi, *pertama* reinterpretasi teks agama. Agama-agama yang secara historis memiliki pegangan atau dalil-dalil yang dianggap sakral, suci dan atau adanya pegangan lainnya sehingga menumbuhkan adanya umat, sebagai bagian melanggengkan ajaran tersebut. Dalam istilah Emile Durkheim sebagai prasyarat adanya sesuatu yang disebut agama adalah umat atau jamaah untuk melanggengkan ajaran-ajaran teks.

Umat agama-agama tidak pernah berhenti bergerak. Dia senantiasa dinamik sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial yang ada. Bagaimana umat atau jamaah memahami teks, kemudian menjadi penting dibahas. Mengingat, perkembangan yang terus terjadi sehingga teks tidak kehilangan makna historis dan konteks sosialnya. Terjadi perdebatan sengit pada aras teks ini. Ada pihak yang tetap berpendapat bahwa teks suci keagamaan tetap harus dipahami sebagaimana adanya. Dia harus dibaca secara tekstual. Sementara itu ada pihak yang berpendapat bahwa teks harus dipahami secara kontekstual, tidak literalis sebagaimana adanya. Hal ini karena, teks datang pada jamaah bukan tanpa konteks sosial yang kosong. Teks hadir dalam kondisi sosial tertentu, bukan kevakuman sosial. Di sinilah kemudian teks harus dipahami secara kontekstual, sehingga teks agama memiliki relevansinya sepanjang masa. Yang paling penting adalah substansi dan spirit dari teks tersebut yang harus dipahami dan diaktualkan.

Jika kelompok pertama tetan

pun tidak akan pernah ketinggalan zaman akan senantiasa mampu menjadi alter pemecahan masalah. Sementara, di pihak berpendapat bahwa teks tidak mungkin memabntu menyelesaikan masalah, ta pembacaan baru. Pembacaan yang lo partisipatif dan kontekstual. Dan terny pendapat kedua inilah yang tampaknya t berkembang, dan menjadi bagian munculnya gerakan sosial baru, yang tum dari gerakan antaragama.

Kedua, tumbuh dan berkembang wacana tentang pluralisme, HAM, kesetar jender dan demokrasi. Pertumbuhan perkembangan wacana berkaitan dengan tema ini pada akhirnya memberikan ban inspirasi pada kalangan kelas menengah (intelektual), aktivis ornop, birokrasi, pa politik, bahkan tentara. Wacana tent pluralisme dengan sendirinya mengharus setiap orang untuk mampu hidup berdampin dengan orang lain. Dengan menyad pluralisme, akhirnya harus melahir masyarakat yang berkarakter menghormati al hak asasi manusia, sehingga tidak lagi bertin diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, ras, st maupun agama. Perbedaan SARA dan gen tidak dipandang sebagai penghalang seseorang untuk berbuat adil. Bahkan, pluralisme SAI dan gender menjadikannya sebagai masyara yang sadar akan perbedaan itu sendiri. SAI sebagai ibu kandung tanah air ini menj pijakan bersama untuk merespons masala masalah sosial kemanusiaan yang ada.

Perkembangan wacana tenta pluralisme, HAM, dan keadilan jend menghentak para aktivis ornop dan intelektu progresif, secara terus-mener mengkampanyekan keadilan untuk sem lapisan masyarakat, tanpa pandang a agamanya, ras, suku, etnis, dan

adalah humanisme universal yang membela seluruh umat manusia. Gerakan inilah yang bisa dibidang sebagai gerakan perjuangan demokrasi sipil, tanpa kekerasan untuk mencumbuhkan *civil society*.

Ketiga, munculnya beberapa NGO yang bergerak dalam wilayah praksis di lapangan. Gerakan NGO tersebut ada yang berujud advokasi, pendidikan politik, persebaran wacana/diskursus, pendampingan, rekonsiliator maupun fasilitator. Gerakan dari NGO-NGO ini sebenarnya bisa mengarah pada gerakan sosial baru. Memang masih bersifat gradual, terpisah-pisah, tetapi gerakannya jelas telah memberikan dampak positif pada masyarakat luas dalam proses penyadaran, pendidikan, dan pencerahan. Akibat yang paling nyata adalah tumbuhnya sikap kritis dan alternatif pemikiran dalam memecahkan masalah masyarakatnya.

Salah satu kelebihan NGO-NGO ini, adalah upaya melakukan sintesa antara kemampuan teoritik dan pengamalaman praksis di lapangan yang berbasis multiagama, multienis, dan multi level. Dengan pijakan gerakan seperti itu, maka NGO-NGO ini lebih bisa diterima di tengah masyarakat luas ketimbang NGO-NGO berbasis agama tertentu, atau etnis tertentu. Inilah yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai basis kultural NGO, karena bergerak bukan pada segmentasi masyarakat lokal tetapi persamaan visi dan misi, yakni proses pendidikan dan pencerahan masyarakat. Hanya sayang, gerakan NGO-NGO ini sekalipun berbasis rakyat karena lebih bersifat advokatif, dan pencerahan, acapkali mereka datang ke masyarakat dengan membawa konsep-konsep yang telah dipersiapkan lebih dahulu, sehingga partisipasi masyarakat sedikit berkurang dalam menentukan

arah dan tujuan dari gerakan advokasi tersebut.

Keempat, keberadaan intelektual/cendekiawan independen dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan dan eksplorasi keilmuan yang bersifat multidisipliner, multibatasi, dan kritis. Kehadiran intelektual/cendekiawan independen yang tergabung dalam perguruan tinggi yang bervisi kerakyatan dan kritis menyebabkan lahirnya pelbagai ilmu-ilmu yang berbasis multikultural, berbasis pengalaman riil masyarakat, dan mampu memberikan kontrol terhadap kekuasaan.

Ilmuwan/cendekiawan seperti itulah, yang kita sebut sebagai cendekiawan yang mempunyai keberpihakan. Bukan "intelektual proyek", atau "intelektual tukang", yang belakangan marak di tanah air kita dengan alasan kurang sejahteranya kehidupan para intelektual. Untuk mengatasi kekurangan dalam kehidupan privasinya, maka intelektual-intelektual yang semestinya berpihak pada rakyat, akhirnya "mproyek" atau "nukang". Intelektual/cendekiawan tukang jelas merusak citra kaum intelektual/cendekiawan, oleh karena itu harus dikontrol dan dikritik agar mereka kembali pada fungsinya, yakni menjadi pencari kebenaran, pemberi pencerahan dan "mendidik rakyat" agar melek huruf. Di sinilah, agaknya intelektual organik dapat menjadi pilihan.

Intelektual organik, meminjam istilah Antonio Gramsci menjadi bagian tersendiri dalam proses perkembangan *civil society* di Indonesia. Intelektual-intelektual organik ini muncul di lingkungan perguruan tinggi dan aktivis-aktivis gerakan sosial kemasyarakatan yang bekerja bukan berada di atas angin, meminjam istilah WS Rendra, bukan sebagai kelompok intelektual "menara gading", tetapi bekerja berdasarkan fakta-fakta atau penemuan-penemuan riil di tengah masyarakatnya.⁷ (Fakih:

2002).

Kelima, munculnya krisis multidimensi. Krisis multidimensi yang melanda negeri ini sejak pertengahan 1997 di bawah kekuasaan Orde Baru menyadarkan masyarakat bahwa negeri ini menyimpan segudang masalah yang membutuhkan pemecahan segera. Krisis politik yang menimpa bangsa ini telah memunculkan adanya ketidakpercayaan pada elite-elite politik, tidak adanya figur pemimpin yang mampu menjadi perekat nasional (*integrator*), apalagi sebagai *negarawan*, telah menyebabkan munculnya kekerasan massal di pelbagai daerah. Oleh sebab itulah, gerakan sosial baru lahir untuk mencari alternatif penyelesaian masalah krisis multidimensi.

Terlebih lagi kehadiran aparat hukum, aparat keamanan, tentara dan elemen-elemen masyarakat tidak lagi percaya pada hukum, dan main hakim sendiri semakin memperkeruh carut-marutnya krisis negeri ini. Hukum tidak dipercaya lagi oleh masyarakat sipil karena praktik-praktik aparat penegak hukum tidak mencerminkan keadilan hukum. Hukum dapat dimanipulasi dan dapat dibeli, sehingga rakyat sipil mengambil inisiatif sendiri dalam bertindak. Ini memang tidak kita inginkan, tetapi jika hukum kita memang diskriminatif, maka mempersalahkan rakyat suka main hakim sendiri rasanya juga tidak adil. Dari sana nasib *civil society* pun akhirnya dipertaruhkan, apakah akan gagal atau terus berlangsung jika kekerasan massal terus berlangsung. Ini tentu tidak produktif, karenanya harus ada jalan keluar yang memungkinkan kebangunan bangsa ini.

Keenam, munculnya kesadaran transformasi masyarakat. Ketika bangsa ini benar-benar terpuruk oleh krisis multidimensi, maka beberapa elemen masyarakat menyadari perlunya gerakan transformasi masyarakat. Gerakan transformasi ini dilakukan oleh

agama, bahkan berbasis humanis, tidak selangsung berpijak pada agama tertentu, tetapi pada nilai-nilai universal yang dianggap benar. Agama tidak dijadikan ukuran untuk bertingkah dan bergandeng tangan.

Transformasi sosial merupakan agenda masa depan gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Jika gerakan-gerakan sosial mau melakukan transformasi maka di sana akan menumbuhkan relasi setara, adil, antara generasi, relasi kelas, antara kaum marginal dengan kaum berkuasa, kelas miskin perkotaan dengan pemilik modal, dan kaum minoritas dengan kaum mayoritas. Di sinilah sebenarnya transformasi sosial harus segera "dibumikan" sehingga relasi kelas yang mengarah pada ketidakadilan kekuasaan politik dan ekonomi terjembatani. Transformasi sosial sebagai agenda masa depan gerakan sosial yang akan secara bertahap menumbuhkan gerakan sosial baru di Indonesia. Tanpa adanya kesadaran transformasi sosial yang mengarah pada adanya "revolusi kelas" saya kira harapan munculnya masyarakat adil, setara dan merdeka hanya menjadi harapan kosong belaka. pendeknya, kita mau mengupayakan "revolusi kesadaran kelas".

Beberapa faktor penyebab itulah yang menurut hemat saya menjadi embrio tumbulnya gerakan sosial baru di Indonesia, sebagai alternatif dari gerakan-gerakan NGO atau gerakan sosial yang telah ada sebelumnya. Memang masih belum bisa dinilai hasil nyata atau riil dari gerakan sosial baru di atas, karena memang masih bersifat gradual dan serpih-serpihan, belum total.

Liberalisasi Pemikiran

etika gerakan sosial baru seperti di atas kita harapkan, sebenarnya secara tidak langsung kita melihat betapa peta pemikiran dan al (politik) umat memang sangat variatif. Vari-

liberalisasi pemikiran keagamaan. Mengapa? Hal ini karena tanpa gelombang kebebasan dalam pemikiran keagamaan sungguh sulit dibayangkan akan terjadi transformasi masyarakat lewat jalur agama. Agama tidak bisa berbicara dengan sendirinya, tetapi harus ditransformasikan dan ditafsirkan oleh umat manusia. Ini sebuah keyaninan yang mesti tertanam pada semua umat beragama, sehingga agama tidak sebagaimana dituduhkan Karl Marx sebagai opium.

Agama tidak hanya diperuntukkan orang-orang yang kurang bersemangat hidupnya. Agama hanya bisa memberikan tawaran eskatologis yang tidak semua orang meyakini akan ada atau tidaknya kehidupan setelah mati. Bahkan Tuhan pun dianggap telah mati sebagaimana Nietzsche kampanyekan, karena praktik-praktik universalisasi kemanusiaan tidak ada lagi di tengah masyarakat. Untuk itulah, Tuhan mesti dihadirkan kembali di muka bumi? Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah orang-orang beragama dengan semangat solidaritas sosial berupaya merespon tantangan-tantangan kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan, dan penindasan baik kultural maupun struktural. Transformasi agama harus dilakukan dengan segera, agar Tuhan tidak mati dan memiliki masa depan.

Transformasi inilah yang bisa disebut sebagai bentuk riil dari gerakan sosial baru. Tetapi sebelum melakukan transformasi, umat sejatinya telah dengan jelas melakukan kajian-kajian kritis atas fenomena sosial yang terjadi. Fenomena sosial dijadikan sebagai basis analisis untuk kemudian dikerjakan pada tataran praksis. Inilah yang saya sebut sebagai proses transformasi pemikiran keagamaan karena faktor liberalisasi pemikiran. Tanpa gerakan pemikiran saya percaya agama hanya bersifat "membeku" dan bahkan lebih buruk karena memang telah lama

perlu dilakukan adalah membangun kembali agama profetik sebagaimana dulu pernah dilakukan Nabi.

Memang kitab suci telah tidak diturunkan lagi kepada Nabi, tetapi sebenarnya yang harus dipahami adalah bahwa firman itu senantiasa datang pada para Nabi. Barangkali sekarang tidak dikenal nabi dalam arti konvensional, tetapi kita kenal orang-orang yang senantiasa berjuang, berpikir dan bertindak melawan penindasan, melawan kemewahan, melawan pemborosan dan sebagainya. Ini barangkali "nabi baru" yang muncul untuk membebaskan umat manusia agar tidak terjebak dalam ritualisme spiritual yang bersifat rutinitas. Agama ditafsir agar senantiasa sesuai dengan kondisi riil masyarakatnya, bukan dibiarkan dalam kitab suci yang disakralkan. Pembiaran dalil-dalil sama dengan menjadikannya sebagai berhala.

Oleh sebab itulah, agar agama tidak menjadi arkhais (memfosil) perlu dilakukan pembacaan-pembacaan baru yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakatnya. Ada beberapa pendekatan dalam pembacaan atas agama ataupun tafsir kitab suci sehingga lebih mengena dengan realitas sosial yang berkembang. Sedikitnya ada tujuh pendekatan dalam memahami agama sehingga agama terus relevan dan *capable* atas persoalan-persoalan umatnya. Ketujuh pendekatan tersebut adalah, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan feminis, pendekatan fenomenologis, pendekatan filosofis, pendekatan psikologis dan pendekatan teologis (Connolly: 2001). Memang bila kita lacak lebih jauh tampaknya modelnya mengikuti logika Barat yang bersifat positivistik, tetapi tetap relevan untuk membaca fenomena agama.

Tentu masih banyak model pendekatan agama yang bisa ditawarkan, tetapi paling

agama di atas, kita akhirnya mengerti betapa luas dan beragamnya ketika orang hendak mempelajari agama. Tidak hanya satu pendekatan yang akhirnya menghasilkan satu model pemahaman. Di sanalah kemudian kita bisa memahami mengapa terdapat pemahaman berbeda-beda terhadap satu dalil kitab suci misalnya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan atas dalil tersebut misalnya adalah dengan pendekatan sosiologis, historis serta teologis itu sendiri.

Pendekatan sosiologis akan mendekatkan seseorang ketika menafsirkan sebuah dalil pada kondisi sosial ketika dalil tersebut diturunkan. Sementara pendekatan sosiologis akan mendekatkan seseorang yang memahami agama secara kesejarahan atau secara sebab musabab (*asbabun nuzul*) dalil turun. Sedangkan pendekatan teologis akan mendekatkan seseorang yang memahami dalil secara teologis akan lebih bersifat emansipatoris atas dalil-dalil dan agama-agama sebelumnya. Di sinilah pula kadang terdapat semacam pertentangan antara realitas sosial dengan dalil yang turun pada umat beragama. Menurut kajian M. Amin Abdullah karena terdapat dimensi normatif dan dimensi histories.⁸

Berdasarkan pada perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh seseorang itu mendandakan adanya perbedaan pula dalam berpijak. Dari sana hasilnya pun sudah bisa dipastikan akan berbeda-beda, sekalipun mungkin hanya pada tataran metode dan artifisial, namun substansinya sama saja. Pendekatan filsafat perenial barangkali menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses liberalisasi pemikiran keagamaan. Beberapa cendekiawan muslim Indonesia telah mencoba mengapresiasi pendekatan filosofis (baca: filsafat perenial) seperti Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari

Noer, M. Amin Abdullah, dan Musa Asy'ari. Ini tentu turut bukan saja meramaikan liberal pemikiran keagamaan di Indonesia, tetapi semakin memperlihatkan betapa variatifnya pemikiran keagamaan di Indonesia.

Terjadinya liberalisasi pemikiran keagamaan seperti di atas saya kira tidak dilepaskan dari perkembangan ilmu-ilmu sosial yang terus mengalami perkembangan. Munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam ilmu-ilmu seperti ilmu sosial kritis, postkolonial, post-struktural, dan oksidentalisme saya kira memberikan kontrol yang tidak kecil atas terjadinya "revolusi" pemikiran keagamaan di Indonesia. Belum munculnya mazhab-mazhab baru dalam ilmu sosial seperti posmodernisme, mazhab sosial demokrat, mazhab sosial religius, mazhab sosial profetik dan sosial liberal. Memang mungkin butuh eksplorasi lanjut sehingga ilmu-ilmu yang terbitang baru ini benar-benar bermakna. Namun, semua itu buat saya jelas memberikan pengaruhnya atas peta pemikiran agama yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Tidak disadari atau tidak, kita turut pula paling kurang mengakses pemikiran-pemikiran ini, bahkan menjadikannya sebagai rujukan dalam menafsirkan agama.

Pengaruh yang paling kental telah terjadi pada pemikir-pemikir liberal semacam Abdullah Ahmed An-Naim di Sudan, Farid Esack di Afrika Selatan, Hasan Hanafi di Mesir, Nasir Hanafi Abu Zayd di Mesir, dan Mohammed Arkoun di Perancis sehingga mereka memahami agama tidak konvensional seperti kita bangsa Indonesia memahami Islam. Model kritik dan dekonstruksi menjadi ciri khas mereka dalam memahami Islam, sehingga bisa terkesan provokatif dan "mengambangkan" keislaman seseorang.

Wilayah ekonomi, politik, sosial maupun teologis tidak ada yang bisa lepas dari perkembangan pemikiran yang terus melaju. Bahkan, siapa saja yang tidak mau mengikuti perkembangan pemikiran di atas, baru akan sadar bahwa dirinya benar-benar tertinggal dalam beragama. Agama ternyata tidak sekedar wailayah yang kita pahami selama ini. Lebih luas dari yang disangka sebelumnya. Oleh karena itu, pantaslah apabila ada sebuah sindiran bahwa orang yang merasa tahu London, tetapi hanya tahu London, tidak tahu kota-kota lain, sama dengan tidak mengerti aa-apa tentang London. Ungkapan ini saya kira bisa berlaku, siapa yang merasa paling tahu agama yang dianut, tetapi tidak pernah belajar atau mengetahui agama lain, sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang agamanya.

Ungkapan ini mungkin agak simplifikasi, tetapi saya bermaksud mengatakan bahwa hanya mengetahui satu pendekatan dalam beragama sebenarnya terlalu mudah untuk mengatakan orang lain sesat, tidak tahu agama, bahkan ingkar dengan agamanya. Inilah pokok persoalan yang sebenarnya muncul ketika liberalisasi pemikiran keagamaan muncul, di sana akan terjadi bermacam-macam perspektif yang sama-sama valid untuk dipakai, karena pada dasarnya semua jenis pemikiran bersifat interpretatif, karena itu relatif, tidak ada yang berlaku mutlak.

Mazhab Baru Pemikiran

Akibat riil dari adanya liberalisasi pemikiran keagamaan, maka di sana ada pelbagai mazhab pemikiran keagamaan. Untuk konteks ini saya kira ada beberapa mazhab baru pemikiran Islam Indonesia. Di antara mazhab baru tersebut terdapat mazhab konvensional, mazhab radikal/mazhab militan, mazhab moderat serta mazhab liberal. Akan tetapi, mazhab-mazhab ini tidak sedikit

pemahaman atas Islam itu sendiri. Perbedaan itulah yang sebenarnya harus kita jadikan hikmah, bukan pertentangan satu sama lain, sehingga terjadi klaim antara satu dengan yang lain yang berakibat pada adanya saling kafir-mengkafirkan.

Jika dulu kita pernah kenal mazhab Syafii, Hanafi, Maliki dan Hanbali, maka sekarang kita dikenalkan dengan mazhab baru yang sebenarnya bisa sebagai pengembangan dalam mazhab-mazhab *fikih* tersebut. Mazhab dalam konteks ini adalah mazhab pemikiran yang kemudian menjadi kiblat di kalangan umat Islam, terutama kalangan angkatan muda, sekali lagi bukan sebagai mazhab *fikih*!

Perbedaan mazhab-mazhab tersebut antara lain, jika mazhab konvensional ini merupakan mazhab aliran *mainstream* Islam Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam. Memang antara NU, Muhammadiyah, SI, dan Persis terdapat beberapa perbedaan yang bersifat *furuiyah*, tetapi tidak seperti mazhab-mazhab yang muncul belakangan. Mazhab *mainstream* corak pemikiran keagamaannya terasa masih mengacu pada aliran suni, dan sedikit berbau mistik, terutama di kalangan warga *nahdhiyin* sebagai aliran mayoritas, sekalipun di sini Muhammadiyah tidak mau mengakui. Muhammadiyah lebih suka menyatakan diri tidak bermazhab, karena purifikasi, kembali pada al-Qur'an dan hadits. Persis sendiri tampak lebih puritan ketimbang NU, juga tidak sama dengan aliran Muhammadiyah. Barangkali Persis lebih cocok dikatakan sebagai purifikasi akidah atau syariah, ketimbang Muhammadiyah. Muhammadiyah purifikasi dalam arti pembaruan sosial keagamaan mungkin ya, tetapi purifikasi syariah dan akidah barangkali lebih banyak dilakukan oleh Persis. Atau mungkin antara Muhammadiyah dan Persis sebenarnya sama-sama purifikasi

Sementara mazhab militan atau radikal merupakan aliran pemikiran Islam Indonesia yang memang menolak segala bentuk pemikiran dan praktik keislaman yang dianggap sudah melenceng dari ajaran al-Qur'an dan hadits Nabi, kehidupan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah harus menjadi acuan, tanpa *reserve* karena Nabi adalah manusia pilihan yang tanpa cacat sedikit pun. Menolak teladan atas Nabi berarti menolak al-Qur'an dan hadits, sehingga bisa dikategorikan kafir.

Dalam pandangan kaum Radikal/Militan, umat Islam Indonesia telah mengalami banyak penyimpangan dari ajaran "asli", karena banyak praktik keagamaan yang tidak merujuk pada al-Qur'an dan al-hadits Nabi sebagai pedoman. Islam kaffah yang diharuskan oleh al-quran ternyata tidak lagi menjadi bagian integral setiap tindakan umat Islam. Menurut mereka tindakan dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam pandangan Islam radikal/militan praktik politik Indonesia harusnya adalah politik Islam, demikian juga praktek ekonominya, harusnya ekonomi Islam. Islam harus menjadi alternatif atas kegagalan sistem ekonomi kapitalistik.

Bahkan pandangan kaum Islam Radikal secara terang-terangan menyatakan bahwa partai-partai politik yang berbasas Islam seperti PPP dan PBB, sebagai partai yang mendapatkan suara tidak pernah memperjuangkan aspirasi umat Islam. Mereka hanya berjuang dalam retorika politik, belum pada real politik yang ditunggu-tunggu masyarakat Islam, demikian kata ketua Front Pembela Islam Surakarta, suatu ketika dalam sebuah seminar di Yogyakarta, 28 September 2002.

Mazhab moderat sebuah aliran pemikiran Islam Indonesia yang bisa menerima pelbagai macam corak ragam pemikiran Islam, tidak bersikap menolak atau menerima keseluruhan model pemahaman keagamaan yang berkembang

agenda membangun negara Islam, karena yang diperlukan adalah substansi pemikiran dan Islam Indonesia. Mazhab moderat bila saya katakan sebenarnya merupakan mazhab pemikiran keagamaan yang mendekati pada "abangan", jika mengikuti Clifford Geertz.

Mazhab moderat ini bila bisa disederhanakan sebenarnya merupakan mazhab paling banyak pengikutnya. Para para pengikut mazhab ini sebagian besar merupakan kelas menengah ke bawah dalam komunitas Islam ketimbang kelas menengah ke atas. Pendek kata para pengikut mazhab moderat adalah kelas "awam" dalam berislam, bukan kelas intelektual Islam atau pengusaha muslim. Memang beberapa yang termasuk pengusaha atau intelektual, tetapi sering disebut sebagai kelas menengah. Mereka adalah kelas "biasa", yang senantiasa sederhana dalam beragama. Agama adalah *ageman* (pakaian), bukan ritual.

Karena agama dipahami sebagai *ageman* (pakaian), maka proses-proses ritual simbolik biasanya tidak terlalu ketat pada mazhab. Mazhab ini tampak dekat dengan "kaum penghayat" dalam aliran-aliran spiritualitas. Barangkali bisa dekat dengan paham sufistik dalam Islam, yang lebih menekankan hakikat dan makrifat ketimbang simbol.

Sedangkan mazhab Liberal merupakan mazhab yang belakangan ditolak dan ditucuk kafir oleh mazhab radikal atau militan, karena melakukan pembongkaran teks-teks suci secara radikal, mempertanyakan kembali otentisitas kitab suci, hadits nabi dan sejarah Islam. Bagi mazhab liberal yang paling penting adalah perlunya tradisi kritis dan dekonstruksi atas pemahaman lama yang telah beratus-ratus tahun berkembang. Mazhab liberal memaham Islam bukan sebagai barang sekali jadi, sudah *given* dari *sononya*, tetapi harus dilihat konteks sosial historisnya. Islam harus dipahami

reason, karena Islam sendiri merupakan agama yang sangat rasional, dan mengutamakan rasionalitas, dalam bentuk *ijtihad* adalah bentuk konkretnya.

Mazhab liberal secara tegas berani melakukan kritik atas tradisi keislaman yang telah lama berkembang. Islam harus dipahami secara kontekstual, progresif dan emansipatoris. Dengan pemahaman seperti ini, menurut mazhab ini Islam akan terus maju, bukan mundur. Islam dengan demikian harus lebih mengutamakan *reason*, ketimbang *feeling* dan *fear*. Mengapa harus lebih bersifat *reason*. Hal ini karena selama ini Islam yang dipahami lebih bersifat *feeling* ternyata mengakibatkan munculnya "wajah Islam" yang penuh kekejaman, penindasan dan diskriminasi. Penjelasan lebih lanjut akan dilakukan di bawah ini, sehingga menjadi isu penting di tanah air, paling kurang sampai sekarang ini.

Mengapa Islam Liberal

Mengapa Islam Liberal. Inilah pertanyaan yang menurut saya penting diajukan sebelum saya membahas lebih banyak tentang Islam Liberal dalam diskusi ini. Dengan mengajukan pertanyaan mengapa Islam Liberal, sebenarnya saya hendak mengatakan pada publik bahwa inilah pilihan posisi yang saya ambil, dan barangkali terlalu eksplisit "berkampanye" tentang Islam Liberal, ketimbang gerakan-gerakan Islam yang lain.

Sebenarnya sederhana saja, mengapa saya menggunakan tema Islam Liberal dalam pembahasan penulisan ini; yakni ingin menempatkan gerakan intelektual Islam Liberal di Indonesia sebagai bagaian dari gerakan Islam yang paling mutakhir, paling digemari terutama oleh kalangan muda, dan mungkin sebagai alternatif atas kecenderungan gerakan-

Muhammadiyah. Namun, demikian, saya juga akan melakukan kritik terhadap Islam Liberal itu sendiri sehingga Islam Liberal tidak menjadi sebuah gerakan yang bercorak eksklusif, sektarian gaya baru dan sangat ideologis.

Secara genealogi dan sosilogis pemikiran Islam Indonesia yang kemudian memunculkan Islam Liberal sebagai gerakan pemikiran Islam Indonesia sebenarnya hendak ditunjukkan betapa pemikiran Islam Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, tanpa pengaruh dari gerakan intelektual sebelumnya. Tetapi, lebih dari itu, perbedaan-perbedaan antara gerakan Islam Liberal dengan gerakan Islam sebelumnya, baik yang modernis, konservatif, maupun neo-modernis.

Terdapat perbedaan yang tajam antara model pemikiran Islam tradisional, modernis, dengan liberal. Jika tradisionalisme Islam itu lebih mangacu pada kehidupan salafiyah zaman nabi dan para shahabat. Mereka biasanya dikenal dengan kaum salafi. Tradisionalisme Islam tidak saya katakan sebagai kaum *nahdhiyyin*, karena warga *nahdhiyyin* menurut hemat saya tidak cocok lagi jika dikatakan sebagai tradisional Islam. Sementara, modernisme Islam sebenarnya merupakan gerakan pemikiran yang lebih dekat dengan respons-respons cendekiawan atas gelombang modernisasi, developmentalisme, sekularisasi dan isu modern lainnya, seperti demokrasi. Tipe modernisme Islam belakangan lebih dekat dengan militan Islam, dalam kadar tertentu. Neo-modernisme biasanya dirujuk pada Fazur Rahman dari Pakistan yang mengajar Islamologi di Chicago University, dan di Indonesia diteruskan oleh Gus Dur, Cak Nur, Djohan Effendy, dan Ahmad Wahib (Barton, 1995) Sementara itu, liberalisme Islam merupakan gerakan pemikiran yang *beyond* modernisme,

pribadi yang ada di dalamnya mungkin sebelumnya, berlatar belakang salah satu organisasi tertentu.

Berkaitan dengan Liberalisme Islam Indoensia, mereka melakukan eksplorasi lebih mendalam tentang siapa Islam Liberal, dengan segala sepak terjangnya sehingga mereka masuk dalam kategori liberal. Memang problematik, ketika saya menyatakan liberal, sementara mereka juga "terpenjara" pada gagasan-gagasan dari cendekiawan-cendekiawan yang menjadi idolanya. Tampak di sana bila kita cermati, Islam Liberal sangat mengidolakan para pemikir-pemikir dari Mesir (Timur Tengah), semacam Nashir Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Mohammed Arkoun dan Abid Al-Jabiri. Di sinilah bila kita kritis, Islam membuat "penjara" sendiri atas Liberalisme pemikiran. Oleh sebab itu, kritikan para penggagas dan peminat Islam Liberal mengutamakan kebebasan berpikir itu sendiri dan tidak harus didefinisikan.

Sementara tentang gerakan Islam Liberal di Indonesia kita melihat di sana bagaimana gerakan Islam Liberal mengemas tema-tema diskursus untuk publik, keseriusan dan antusiasme yang diperlihatkan. Ini sebenarnya memberikan posisinya tersendiri sebagai kelompok "elite" muslim, bukan yang lain. Posisi gerakan dan masa depan Islam Liberal saya menduga Islam Liberal akan menemukan momentumnya sehingga lahir sebagai *genre* dalam pemikiran Islam Indonesia kontemporer.

Dengan pikiran seperti itulah, maka saya memberanikan diri untuk menempatkan Islam Liberal sebagai bagaian dari gerakan sosial baru, yang kemunculannya dan momentumnya sangat strategis di tengah maraknya gerakan Islam Radikal atau Islam Militan terutama perhimpitannya dengan gerakan dan gelombang demokratisasi yang tengah melanda

Pertanyaan yang bisa diajukan di s Akankah Islam Liberal menjadi gerakan Is rakyat, sehingga tidak terkesan elitis dan mar menjangkau mayoritas umat Islam bah mayoritas umat beragama kita akan li bersama dalam perkembangannya. Keberhas atau kegagalan Islam Liberal akan tergantung respon umat.

Tanpa respon dari kalangan masyarakat (umat), maka gerakan apapun hanya al menjadi gerakan *intellectual exercise* yang a berakhir dengan masturbasi intelektual p peminat, penikmat dan simpatisan lainnya. S kira Islam Liberal tidak ingin menjadi geral *intellectual exercise* yang hanya ak menghasilkan ejakulasi dini dalam beragar Salah satu ciri khas dari gerakan Islam Libe adalah adanya keseriusan dalam mengkaji ter tema sosial sebagai masalah bersama yang ha diketahui bersama. Gerakan semacam ini je menandakan adanya intensitas pertemuan gagasan-gagasan segar, orisinal dan libera ketimbang gerakan angin-anginan.

Keseriusan, dan kecermatan se kematangan intelektual ini yang tampak hendak diemban oleh gerakan Islam Libe sehingga mereka tidak berakhir di tengah jal sebelum misinya berhasil. Keseriusa kecermatan dan kematangan intelektual Isl Liberal terlihat ketika mendiskusikan tema-ter krusial di tanah air, sehingga menjadi milik publ

Islam Liberal tampaknya sangat inten dan apresiatif dengan tema-tema HAM demokrasi, pluralisme agama dan gender. Mereka mengkonstruk tema-tema ini seca modern, dalam arti dengan wahana internet d media massa, suatu yang merupakan bagian d ciri-ciri masyarakat modern. Inilah yang bi membedakan gerakan pemikiran Islam Libe era 2001 hingga sekarang dengan gerak pemikiran neomodernisme Islam era Cak. N

Islam liberal berkampanye ke kampus-kampus dan berbasiskan mahasiswa di IAIN (UIN) baik Jakarta maupun Jogja, dan beberapa di universitas negeri dan swasta, seperti di Jogja ada di UGM, UMY dan UII. Sementara di Jakarta di UMJ dan UNJ. Mereka biasanya sudah bisa berpikir melampaui organisasi dan mazhab fikih tertentu. Ikatan mereka adalah "kebebasan berpikir" itu sendiri, bukan organisasi maupun mazhab fikhiyah.

Pemikiran Islam liberal acapkali terlihat berhadapan dengan Islam *mainstream* (NU dan Muhammadiyah) maupun gerakan Islam lainnya seperti saya sebut di atas. Bahkan, beberapa orang penganut Muhammadiyah dan NU di Jogjakarta misalnya, sangat khawatir dengan pemikiran Islam Liberal. Mereka ketakutan pada Islib karena merasa apa yang digulirkan akan merusak akidah Islam, terutama keimanan masyarakat Islam. Tema tentang pluralisme agama, dan dialog antaragama adalah dua tema yang dianggap paling membahayakan umat Islam. Dua tema ini dipandang sebagai tema yang akan membawa umat Islam ke arah kedangkalan dan kekafiran baru, karena umat Islam tidak lagi meyakini bahwa kebenaran dalam Islam adalah mutlak.

Islam liberal di kalangan sebagian orang Muhammadiyah di Yogyakarta, baik generasi tua maupun generasi muda adalah tidak lebih dari gerakan kaum orientalis-zionis Israel yang berkedok Islam, tetapi sesungguhnya hendak merusak Islam dari dalam. Figur Islib seperti Uthi Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukani, dan Rizal Panggabean misalnya, dianggap sebagai orang-orang Islam yang ingin merusak Islam dari dalam dengan menafsirkan Islam sesuai kehendaknya. Tafsir Islam yang mereka lakukan tidak memenuhi standar ulama salafi, seperti ulama Mesir, katanya.

Apa yang dilakukan Islib dengan

kekinian di kalangan sebagian generasi tua dan muda Muhammadiyah dianggap telah keluar dari Islam yang sebenarnya, sekalipun ukuran Islam sebenarnya di kalangan ini adalah ulama Mesir al-Azhar dan bahkan buku Himpunan Putusan Tarjih, sekalipun HPT diproduksi oleh orang-orang liberal seperti M. Amin Abdullah, yang pernah dikafirkan oleh sebagian orang Muhammadiyah di Yogyakarta.

Tanggapan serius atas Islib bukan saja dari Muhammadiyah DIY, tetapi oleh kelompok gerakan Hizbut Tahrir (HT), yang mengagendakan syariah Islam di Indonesia sebagai hukum resmi negara dan negara Islam sebagai jalan keluar dari krisis. HT yang dulunya berafiliasi ke Partai Keadilan, saat ini di DIY telah "bercerai" dengan PK, sebab PKS sekarang ini telah keluar dari Khittah perjuangan partai-partai Islam. PKS telah kompromi dengan pemikiran-pemikiran sekuler, termasuk pemikiran Liberal, karena itu tidak lagi dianggap partai Islam, oleh HT.

HT DIY posisinya sama dengan sebagian orang Muhammadiyah DIY, mengutuk dan mengharuskan mewaspadaai Islib di kampus-kampus Islam, seperti IAIN, UMY dan UAD. Mahasiswa Islam di tiga kampus ini harus dibersihkan dari gerakan Islib yang dianggap sebagai kaki-tangan Amerika dan kaum sekuler. HT dan Muhammadiyah DIY memosisikan Islib sebagai gerakan Islam yang lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya terhadap umat Islam.

Itulah gambaran sekilas betapa respons yang dilakukan Islib atas perubahan di Indonesia mendapatkan reaksi yang sama kuatnya dari kalangan Islam, bahkan Islam *mainstream* itu sendiri. Namun demikian, hemat saya apa yang telah dilakukan Islib membawa angin perubahan di kalangan kaum muda Muhammadiyah dan NU, karena jika kita perhatikan secara cermat,

juga berlatar belakang Muhammadiyah maupun NU, tetapi mereka telah mampu berpikir melampaui sentimen organisasi dan mazhab pemikiran tertentu.

Wacana yang dikembangkan di tengah masyarakat Islam adalah tema-tema yang sangat penting direspons, mengingat itulah sebenarnya realitas umat beragama (baca: Islam) hidup di tengah pluralisme agama. Umat Islam oleh Islam diajak agar berpikir dan bersikap realistis, tidak hitam-putih serta menawarkan wajah Islam yang toleran, santun, rahman, rahim dan berkah untuk semua.

Akhirul Kalam

Setelah saya melakukan penglihatan dan mengamati perjalanan intelektual gerakan di Indonesia secara umum, saya meletakkan gerakan Islam Liberal di tengah gejolak bangkitnya Islam yang tampak serba "mutlak", tanpa dialog dan kerja sama sebagai zaman baru Islam Indonesia. Kehadiran Islam Liberal saya lihat sebagai bagian proses pendidikan publik, bukan sekedar melakukan ideologisasi atas publik. Saya percaya upaya yang dilakukan komunitas Islam Liberal mengusung tema-tema demokrasi, HAM, jender, hubungan antaragama, dan pluralisme merupakan bagian dari gerakan demokrasi yang didamba banyak pihak. Seluruh upaya ini tetap akan bernilai sekalipun kecil sebagai proses pendidikan yang memerdekakan, bukan memenjarakan.

Studi ini sebenarnya ingin mengaskan bahwa sebuah pemikiran Islam Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut bukan hanya pada tataran ideologis politik, tetapi sekaligus pada praktik politik, terutama sejak reformasi tahun 1998. Namun yang paling penting sebenarnya, bahwa perubahan pemikiran dan aksi Islam Indonesia itu dilakukan oleh mereka yang semula

pernah sangat akrab dengan tradisi-tradisi pesantren, yang merupakan cikal bakal pendidikan Islam Indonesia, kemudian memahami pemikiran-pemikiran Barat kontemporer, seperti filsafat, sosiologi, politik, dan sastra.

Kelompok seperti inilah yang sekarang membawa gerbong baru tentang pemikiran Islam di Indonesia. Mereka memberikan makna yang lebih dalam tentang Islam berhadapan dengan gelombang modernisasi dan demokratisasi. Pemahaman Islam mereka dikemas dalam tradisi yang sangat modern, bahkan mungkin "melampaui" tradisi-tradisi intelektual Islam sebelumnya. Kelompok ini tampaknya berhasil menggabungkan ilmu-ilmu tradisional dengan ilmu-ilmu modern yang diperoleh baik secara otodidak, maupun berhasil diraihinya dari kuliah-kuliah di universitas terkemuka.

Kesarjanaan mereka akhirnya menjadikan kelompok ini sebagai bukan sekedar "penarik gerbong" neo-modernisme, seperti pernah populer ketika Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan dan Ahmad Wahib melakukan refleksi kritis dan evaluatif atas pemikiran Islam Indonesia, era 1970-an sampai 1980-an waktu itu. Era Nurcholish, dkk itu kemudian dikenal dengan era "Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia". Sedangkan era sekarang yang diusung kaum muda antargenerasi dan antaragama adalah gerbong Islam Liberal, suatu istilah yang menurut saya memang provokatif.

Dari situlah kemudian, sejak pertengahan tahun 2001 atas sponsor sebuah *funding agency*, kelompok anak-anak muda yang rata-rata berumur 35-45 tahun bergabung di Jaringan Islam Liberal, yang bemarkas di Utan Kayu. Tempat ini semua lebih banyak mendiskusikan masalah-masalah sastra, kebudayaan dan sosial politik namun akhirnya entah "malaikat dari

sehingga masalah-masalah Islam juga menjadi pusat perhatian, bahkan sekarang sangat dominan dalam kancah kajian Utan Kayu. Utan Kayu sendiri (TUK) terdiri intelektual budayawan semacam Goenawan Mohammad, seorang wartawan senior dan mantan pemimpin majalah Mingguan *Tempo*. Di mana letak relevansi pemikiran Islam Liberal? Itulah

persoalan yang mestinya menjadi bahan perbincangan di sini.

Saya berharap akan muncul refleksi-refleksi dan kajian-kajian lebih lanjut dari publik, sehingga turut mewarnai perdebatan intelektual tentang masalah-masalah sosial yang sedang berkembang secara terbuka, jujur, dan mendidik. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Histositas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1997
 Assyaukanie, Luthfi, *Wajah Liberal Islam Indonesia*, JIL Jakarta, 2002
 Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1995
 Binder, Leonard, *Islamic Liberalism*, Chicago University, 1988
 Collony, Peter, *Pendekatan Studi Agama*, LkiS, Yogyakarta, 2001
 Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997
 Fakih, Mansour, *Jalan Lurus*, Insist Yogyakarta, 2002
 Gidden, Anthony, *The Third Way*, Gramedia, Jakarta, 1998
 Kurzman, Charles, *Liberal Islam: A Sourcebook*, Chicago University, 1998
 Mulkhan, Abdul Munir, *Islam Murni*, Benteng, Yogyakarta, 2001
 Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam Indonesia, 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1987
 Singh, Rajendra, *Teori-Teori Gerakan Sosial Baru*, dalam *jurnal Wacana*, Insist, 11, Th 3, 2002
Wajah Liberal Islam Indonesia, Luthfi Assyaukanie, JIL Jakarta, 2002
 Zada, Khamami, *Islam Radikal*, Teraju, Jakarta, 2002